

PAD

by Ekonomi Unars

Submission date: 15-Apr-2020 10:08PM (UTC-0700)

Submission ID: 1291753219

File name: JURNAL_PAD.doc (556K)

Word count: 3240

Character count: 21678

3
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN OPINI AUDIT
ATAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

Lita Permata Sari¹⁾, Nanik Hariyana²⁾

Abstract

Public sector reforms response to criticism such as unproductive, inefficiency, low quality, lack of creativity and innovation, and always loss. To see the existence of the public sector in financial management, in particular the financial performance of local government, this research impact of the Local Revenue earned by regions in 38 district / city in East Java and Audit Opinions provided by the Supreme Audit Boards of the financial statement local government financial performance. The purpose of this study to determine whether there is influence of local revenue and audit opinions on the local government financial performance. This research in data analysis use multiple regression analysis with software SPSS versions 22. The results of research, analysis describe the local revenue and audit opinions have no effect on financial performance local governments in 38 districts / cities in East Java.

Keywords: Local Revenue, Audit Opinion, Financial Performance

Pendahuluan

Pada tahun 1970-an banyak kritikan yang ditujukan kepada sektor publik karena dianggap sudah tidak efisien dibandingkan kemajuan dan perkembangan di sektor swasta (Mardiasmo, 2002:15). Menurut Mahmudi (2010:34) menyebutkan bahwa organisasi sektor publik dianggap tidak efisien dan produktif, kurang inovasi dan kreativitas, kualitas yang rendah, hingga selalu rugi. Buruknya kinerja sektor publik mendorong suatu gerakan reformasi manajemen di sektor publik yang sejak tahun 1980-an dikenal dengan *New Public Management* (NPM) (Hood, 1995). Pendekatan NPM digambarkan sebagai bentuk revitalisasi sektor publik dalam rangka menuju pemerintahan yang lebih menekankan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas (Hood, 1995; Boston et al., 1996).

Reformasi yang terjadi di sektor publik disertai juga memanfaatkan reformasi sistem akuntansi sebagai salah satu sarannya (Carlin, 2005). Reformasi sistem akuntansi dianggap

sebagai hal yang penting karena memiliki peran dalam keberhasilan penerapan NPM. Di sektor publik, akualisasi akuntansi merupakan salah satu penerapan NPM. Di Indonesia, penerapan akuntansi akrual diawali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di tahun 2003 dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan, semangat dari reformasi dalam pengelolaan keuangan negara yang dapat dilihat dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, sebagaimana dijadikan rujukan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan keuangan secara maksimal baik disisi negara maupun daerah. Pelaksanaan reformasi pengelolaan

keuangan negara menjadi lebih nyata sejak dite¹²kannya perbendaharaan negara (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara), dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Halim dan Kusufi, 2012). Undang-undang yang telah dijabarkan diperuntukkan sebagai acuan atau pedoman untuk mengelola keuangan negara dimana berpedoman pada *international practices*. Berbagai perkembangan didalam pengelolaan keuangan negara memunculkan berbagai peraturan pemerintah dan nantinya mengharapkan *good governance* di pemerintahan atau bisa menghasilkan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Dalam prosesnya pihak dari pemerintah pusat atau daerah mengambil peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dan berbagai perubahan yang terjadi dalam sistem tata kelola atau pengelolaan keuangan..

Hal tersebut berupaya mendukung proses pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel sebagaimana diamanatkan pada peraturan perundangan tersebut, pemerintah terus berupaya mengembangkan kebijakan akuntansi yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki tujuan agar bisa menjadi acuan pokok dalam penyusunan LK (laporan keuangan) dan menyajikan LK. Secara berkelanjutan berbagai peraturan ditetapkan sampai akhirnya pemerintah mempertegas dengan diterbitkannya Permendagri No. 64 tahun 2013 mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruals dalam Pemerintah Daerah¹ sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akruals sebagai pengganti Peraturan Pen³¹ntah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual.

Undang-Undang Nomer 17¹⁹ tahun 2003 memberikan amanat jika bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP dimana sebuah standar sebagaimana memiliki wewenang hu⁴um dalam usaha menaikkan mutu pada laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Halim dan Kusufi, 2012). SAP inilah yang menjadi pedoman penerapan sistem akuntansi basis akrual. Dirjen Keuangan Daerah, Yuswandi A. Tem⁴ggung menyatakan bahwa Penerapan PP Nomor 71 tahun 43¹⁰ wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh per 1 Januari tahun 2015 (www.keuada.kemendagri.go.id).

Di Indonesia, dalam proses pengelolaan keuangan telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual oleh beberapa Pemerintah Kabupaten. Di antaranya, Pemerintah Kabupaten Semarang dan Sleman yang telah berhasil melaksanakan sistem akuntansi akrual (Bastian dan Gatot, 2003). Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah mulai melaksanakan sistem akuntansi berbasis akrual (www.bantenraya.com). Tetapi dalam hal nyata, tidak semua Pemerintah kabupaten atau daerah sudah menggunakan akuntansi dengan sistem basis akrual, hal ini dipengaruhi oleh kendala atas kekurangan dari penerapannya sebagaimana dirasakan masing-masing Pemerintah Daerah berbeda-beda. Yang mana baik segi SDM-sumber daya manusia, kompetensi, dan fasilitas penunjang.

Kondisi di atas memberikan gambaran bahwa penggunaan dalam pengelolaan akuntansi yang berbasis akrual adalah kompleks. Berbeda halnya ketika penggunaan atau penerapan sistem akuntansi dengan basis akrual dianggap berhasil, salah satunya bisa dinilai melalui pendapat Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah⁴² (LKPD) yang diperolehnya. Opini yang

diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penerapan sistem akuntansi kas menuju akrual yang telah sesuai dengan standar akuntansi, yaitu dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah kabupaten/daerah pada LKPD. Pandangan berbeda dari Kumorotomo (2009) yang menjelaskan terdapat masalah akuntabilitas di Indonesia. Hal tersebut berupa buruknya kinerja penyelenggaraan anggaran daerah, sehubungan dengan *administrative accountability* dan *professional accountability*. Hal tersebut karena kita melihat semakin berkurangnya LKPD yang memperoleh (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Bagian penting dari pemulihan dalam sektor pemerintahan adalah melaksanakan pengukuran kinerja (Greiling, 2005).

BPK RI (2011), Opini yang terdapat di laporan LKPD memberikan informasi mengenai kepatuhan dan ketidakpatuhan dengan dasar peraturan yang memberikan pengaruh langsung dan memuat unsur material atas penyajian laporan keuangan. Suwanda (2015) menyebutkan bahwa keberhasilan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, bisa diamati dari hasil opini WTP yang diterima. Kuntadi, 2008 dalam Nurdin 2014 mengungkapkan bahwa jumlah dana APBD yang diperuntukkan dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah bisa diamati dari LKPD.

Dalam laporan keuangan bisa dilihat dari item pendapat daerah, yaitu yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah/PAD. PAD dilihat sebagai salah satu faktor dalam memberikan gambaran pengaruh pada keberhasilan suatu daerah. Besarnya PAD berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah daerah bekerja, PAD yang tinggi berarti menandakan jika pemerintah sanggup mengefisienkan sumber daya.

Informasi tersebut berguna dalam mengoptimalkan atau meningkatkan dasar kualitas sebagai informasi untuk pengambilan sebuah keputusan. Kapasitas dan kualitas keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai PAD. Variabel PAD dan opini audit hasil pemeriksaan audit BPK dalam penelitian dapat diperuntukkan dasar pada alat ukur kinerja keuangan dari sebuah pemerintah kabupaten/daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, penelitian mempunyai tujuan agar bisa mengetahui pengaruh dari PAD yang diterima dan opini audit yang diberikan BPK pada penilaian kinerja suatu pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur, serta potensi yang ada pada kewenangannya.

Bastian (2006) mengungkapkan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan adalah menilai kinerja keuangan terkait efisiensi dan efektifitas

Kinerja keuangan memiliki tujuan yang dikemukakan oleh Bastian (2006), yaitu mengetahui kinerja keuangan dalam hal efisiensi dan efektifitas. Hal itu juga diungkapkan oleh Mandel (1997) dan Vago (2008).

Kajian Literatur

Gambara Umum PAD

Definisi PAD merupakan jumlah pendapatan dari daerah dan hasilnya diambil dengan dasar aturan-aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Bastian, 2006). Sumber PAD dihasilkan dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, dan yang hasilnya tidak digabungkan.

PAD memiliki pengaruh kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota (Julitawati., 2012). Marfiana (2003) melakukan penelitian dan hasilnya mengungkapkan hal yang berbeda, yaitu PAD tidak ada pengaruh pada kinerja keuangan pada sebuah pemerintah daerah baik kabupaten/kota. Keadaan dimana pemerintah kabupaten/daerah yang

memiliki ⁴⁵ asset dan kekayaan yang besar tentu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari masyarakat agar menjadi lebih baik, terutama untuk pengelolaan juga penggunaan ³⁵ nua
H1: Terdapat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Jawa Timur.

Gambaran Umum Opini Audit

Bagian laporan audit dianggap penting adalah opini audit. Hal itu dikarenakan opini audit berisi kesimpulan opini auditor atas laporan keuangan yang diaudit. Ada 4 pendapat yang disimpulkan oleh BPK RI, diantaranya adalah WTP (wajar tanpa pengecualian) atau (*unqualified*), WDP (wajar dengan pengecualian) atau (*qualified*), TW (tidak wajar) atau (*adverse*), dan TMP (tidak memberikan pendapat) atau (*disclaimer*).

Dari hasil opini yang diberikan, opini WTP atau (*unqualified*) memiliki nilai paling baik dalam pengelolaan keuangan suatu daerah, artinya LKPD disajikan/disajikan secara wajar secara material dan sejumlah informasi dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan. Pendapat terburuk berupa WT (*adverse*), artinya laporan LKPD tak disampaikan dengan wajar untuk semua yang berupa material dan menjadikan informasi dari laporan keuangan tak bisa dipakai. TMP (*disclaimer*) diberikan oleh auditor pada kondisi dimana ada pembatasan dalam lingkup audit ataupun laporan keuangan yang tak sama pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pendapat berupa *adverse* dan *disclaimer* tak bisa dipakai. Laporan dapat diterima oleh pemerintah daerah berupa laporan keuangan dengan WTP, yang menunjukkan kinerja pemerintah sudah memenuhi standar yang ditentukan.

Dari penjelasan di atas keterkaitan kinerja pemerintah daerah pada pendapat audit sehingga dapat dibuat hipotesis:

H2: Terdapat pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Jawa Timur

Gambaran Umum Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan suatu gambaran pelaksanaan dari kegiatan / program atau kebijakan untuk mencapai visi dan misi organisasi, tujuan, dan target. Kinerja bisa

sumber daya guna memperbaiki kemampuan dalam bekerja.

Dari data tersebut, bisa dihipotesiskan dibawah ini:

juga dianggap sebuah prestasi / hasil kerja dihasilkan organisasi untuk waktu tertentu (Bastian, 2006). Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengukur suatu kinerja yaitu membuat suatu komitmen dan memulainya sesegera mungkin, pengukuran terhadap kinerja merupakan proses berkelanjutan (*ongoing process*), menyesuaikan pengukuran terhadap kinerja dengan kondisi organisasi.

Instansi pemerintah daerah dapat berpedoman pada Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dasar dalam membangun dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja dibidang keuangan daerah. Sebagaimana memuat unsur dan aspek dalam penyusunan keuangan daerah terutama beberapa komponen penyusunan PAD (retribusi daerah dan pajak), pendapatan daerah.

Atas dasar tersebut, dengan melakukan pengukuran dengan rinci, komprehensif dan akuntabel/ dipertanggung jawabkan akan mencapai kinerja keuangan.

13

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian

Lokasi dalam Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota Di Jawa ¹³ tahun 2016. Data yg dipakai yaitu data kuantitatif merupakan data yang berisi tentang angka-angka misalnya: pendapat ⁶ asli daerah, opini audit dari BPK. Sumber data pada penelitian ini ⁴⁴ adalah data sekunder, (data sudah dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, BPK RI dan Departemen Keuangan Republik Indonesia).

² Obyek penelitian berupa 38 pemerintah kabupaten/ ¹⁴ di wilayah Jawa Timur, yaitu 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur.

Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder. Data primer diperoleh oleh peneliti berdasarkan wawancara kepada pihak terkait. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang sifatnya sebagai data informasi tambahan, yang bersumber dari literatur: Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPK dan instansi terkait lainnya. Data tahun 2016 yang dipakai yaitu PAD Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur, pendapatan daerah dan belanja daerah Tahun 2016, dan hasil opini audit Kabupaten/Kota Jawa Timur.

Sumber data sekunder lainnya didapat dari penuluran melalui internet, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu yang bisa digunakan sebagai acuan

Metode Analisis

Metode pengambilan sampel untuk penelitian memakai metode non probabilitas (*nonprobability sampling*), yaitu teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, dimana dalam penentuan sampel penelitian menggunakan kriteria atau pertimbangan tertentu sesuai yang ditentukan.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dipakai sebagai pengumpulan. Metode dokumentasi merupakan metode dalam mengumpulkan data sebagaimana diperuntukkan dalam mengumpulkan dan menyatukan data dari tahun yang dipakai dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data dari laporan tahunan (telah dipublikasikan) berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016.

Statistik deskriptif menginformasikan pemaparan dari data yang bisa diamati dari mean (nilai rata-rata), varian, maksimum, minimum, sum, standar deviasi, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2012). Penelitian ini dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, menggunakan analisis data, yaitu Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple regression linier analysis*) yang dilanjutkan dengan Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik diperuntukkan melihat bagaimana hubungan antara variabel independen/bebas (X) dan variabel dependen/terikat (Y) apakah bebas dari gejala

uji asumsi klasik (yang mana terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas). Dalam uji normalitas, penelitian ini menguji dengan uji kolmogorov-smirnov dimana ditunjukkan untuk melihat apakah sebuah model dalam penelitian ini normal atau tidak. Dikatakan penelitian berdistribusi secara normal jika nilai koefisien Asymp.sig (2-tailed) > dari 0,05. Uji multikolinieritas dilihat pada hubungan atau korelasi variabel bebas pada penelitian yang bisa dilihat nilai tolerance dan nilai VIF (*variance inflation factor*) dengan ketentuan nilai tolerance > dari 0,1 dan VIF < 10, dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas (Utama, 2012:105). Sedangkan uji heteroskedastisitas, dalam pengujiannya diperuntukkan mendeteksi gejala heteroskedastisitas yang mana dapat dilakukan dengan uji Glejser (Utama, 2012:106). Dalam penelitian, dikatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi > 0,05.

Multiple regression linier analysis (analisis regresi linier berganda) berupa pengujian digunakan dalam mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan opini audit BPK RI pada kinerja pemerintah kabupaten/kota (daerah) dimana akan diuji dengan melihat tingkat signifikansi.

Dalam hubungan antar variabelnya didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots (1)$$

Y : Kinerja Keuangan

β_0 : Konstanta

β_1 - β_2 : Koefisien variabel independen

X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 : Opini audit

Uji kelayakan model (uji F) dan uji hipotesis (uji t). Hasilnya untuk uji F yang signifikan apabila nilai $F_{sig} \leq 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel bebas sanggup memberikan penjelasan pada variabel terikat (Ghozali, 2012). Pengujian hipotesis dilaksanakan dalam penelitian untuk pengujian pengaruh pada setiap variabel independen/bebas (X) pada variabel dependen/terikat (Y). Pengujian parsial merupakan nama lain dari uji t atau uji sendiri terkait variabel bebas. Uji F dilakukan ketika variabel independen/bebas (X) dalam penelitian lebih dari satu.

Hasil Analisis dan Pembahasan Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

Obyek yang diambil pada penelitian ini yaitu Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa selain Provinsi DKI Jakarta (Daerah Khusus Ibu kota Jakarta), Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Secara astronomis, Provinsi Jawa Timur terletak pada $111,0^{\circ}$ hingga $114,4^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,12^{\circ}$ hingga $8,48^{\circ}$ Lintang Selatan. Secara geografis, Provinsi Jawa Timur mempunyai batas-batas wilayah yaitu disebelah utara batasan dengan Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Selatan), disebelah selatannya berbatasan pada Samudera Hindia, untuk wilayah bagian barat yaitu berbatasan dengan Jawa Tengah, disebelah timur berbatasan pada Pulau Bali.

Wilayah/daerah Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki luas $47.799,75 \text{ km}^2$ yang dibagi atas 38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota. Kabupaten Banyuwangi adalah daerah terluas dengan luas $5.782,40 \text{ km}^2$.

Hasil Penelitian

Peneliti menggunakan datasekunder yaitu opini audit (merupakan hasil audit BPK) LKPD dilansir atau termuat di website BPK pada laman (www.bpk.go.id) tahun 2017. Populasi penelitian seluruh (PEMDA) pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang berada di Jawa Tiimur pada tahun 2016, yaitu sejumlah 29 Kabupaten dan 9 Kota.

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	38	109532988,00	1367020000000,00	51679155967,1317	2289715484840,99760
OpiniAudit	38	,00	1,00	,7895	,41315
KIK	38	,79	2,72	1,0153	,29020
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Data Diolah

Sumber.: Data diolah

Dari tabel 5.1 bisa dilihat jika variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai Nilai minimum Rp 109.532.988.000 yang menunjukkan PAD terendah di daerah Kota Batu pada Tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum Rp 13,67 Triliun, yang menunjukkan PAD daerah Kabupaten Pamekasan. Untuk kinerja keuangan mempunyai nilai minimum 0,79 dan maksimum 2,72 berdasarkan jumlah sampel sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur.

Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda Uji Statistik t

Pengujian ini mempunyai tujuan agar bisa melihat apakah dengan parsial variabel independen, yaitu PAD dan Opini audit memiliki pengaruh dengan variabel dependen (variabel Y-kinerja keuangan pemerintah daerah) yang dilihat pada hasil pengujian statistik uji t (nilai signifikan atau tidak). Dibawah ini merupakan hasil Uji t yang didapatkan:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Kesimpulan
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	1,190	,102			11,668	,000	
PAD	-3,137E-15	,000	-,024		-,151	,881	H1=ditolak
OpiniAudit	-,220	,115	-,307		-1,903	,065	H2=ditolak

Sumber.: Data diolah

Dari hasil tabel diatas, PAD memiliki nilai signifikansi 0,881, artinya PAD tak memberi pengaruh secara signifikan pada kinerja keuangan (PEMDA) pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur. Demikian juga, nilai signifikansi Opini audit sebesar, 0,065 yang memperlihatkan jika opini audit didapatkan pemerintah daerah tidak memberi pengaruh signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari pengujian diatas memperlihatkan jika pemerintah daerah (PEMDA) di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur belum terlihat memfokuskan atau memberatkan pada hasil opini audit

untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Jadi walaupun pemerintah daerah (PEMDA) di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur mendapatkan opini dengan poin atau penilaian terbaik yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), hal diatas kenyataannya tak memiliki pengaruh pada baik atau bagus tidaknya sebuah kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikelola. Hasil penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil serupa, sebagaimana hasil penelitian dari Marfiana dan Kurniasih tahun 2013. Marfiana dan Kurniasih (2013), mengatakan jika opini audit yang diperoleh tak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan.

Uji F atau Uji Bersama-sama (Uji simultan)

Penelitian ini, untuk Uji F (simultan) bertujuan melihat semua variabel bebas atau independen (Variabel X) secara simultan apakah memberikan pengaruh secara signifikan pada variabel terikat (dependen/variabel Y). Perbandingan nilai hitung hasil uji F dengan F menurut hasil F tabel. Dengan melihat nilai pada tabel F dengan tingkat signifikansi 0,05: yaitu 1,76. Dibawah ini hasil dari uji statistik F menggunakan SPSS 22.

Tabel 3 Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,311	2	,156	1,870	,169 ^a
	Residual	2,913	35	,083		
	Total	3,224	37			

a. Dependent Variable: KK

b. Predictors: (Constant), Opini Audit, PAD

Sumber: Data diolah

Tabel diatas memperoleh nilai $F=1,870 > F \text{ tabel}=1,76$, dan nilai signifikansi 0,169, yaitu lebih dari ($>0,05$). Dari penelitian diatas menginformasikan pengaruh PAD dan Opini audit dengan bersama sama tak memberikan pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan bisa memberikan gambaran serta kesimpulan yang diuraikan dibawah ini:

Setelah melakukan uji t (parsial) dan uji F (simultan), penelitian ini menggambarkan hasil PAD dan Opini Audit tidak memberikan pengaruh pada kinerja keuangan di pemerintah daerah dengan jumlah sampel di 38 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Saran

Penelitian ini dapat diberikan saran PAD dan Opini audit yang ditujukan pada penelitian selanjutnya, diantaranya:

- Untuk penelitian lebih lanjut yang memiliki hubungan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang dilihat pada pengaruh PAD dan Opini audit, lebih ditekankan pada menambah jumlah tahun dalam sampel penelitian. Karena penelitian ini memakai hanya periode 1(satu) tahun, yaitu pada tahun 2016.
- Dengan dua variabel yang diteliti, alangkah lebih luas cakupannya untuk meneliti kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dengan pengaruh variabel lain.

Daftar Pustaka

- Boston, J., Martiin, J., Palot, J., dan Walsh, P. 1996. Public Management: The New Zealand Model. New Zealand: Oxford University Press.
- Carlin, T. M. 2005. Debating the impact of accrual accounting and reporting in the public sector. *Financial Accountability and Management*. 21 (3): 309–336.
- Greiling, D. 2005. Performance Measurement in the Public Sector: the German Experience. *International Journal of Productivity and Performance Management* 10 Vol. 54, pp
- Halim, A., dan Kusufi, S. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran*

- Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat.
- 11 Hood, C. 1995. The 'New Public Management' in the 1980s: Variations on a Theme. *Accounting, Organizations and Society*. 10 (2): 93-109.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- 8 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. <http://www.keuada.kemendagri.go.id>.
- 16 Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. 2013. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*.
- 19 Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja sektor Publik* (edisi ke-2). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Peraturan Pemerintah Nomer 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 5
- _____, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- _____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____, Undang-Undang Nomer 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- _____, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- 6 Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2017. *Jawa Timur Dalam Angka 2017*.

PAD

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

23%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to iGroup

Student Paper

2%

2

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

2%

3

jurnal.unars.ac.id

Internet Source

2%

4

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

2%

5

jurnal.umsu.ac.id

Internet Source

1%

6

es.scribd.com

Internet Source

1%

7

journal.trunojoyo.ac.id

Internet Source

1%

8

stiestembi.ac.id

Internet Source

1%

9

id.scribd.com

Internet Source

1%

10	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
11	www.djpbk.kemenkeu.go.id Internet Source	1%
12	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
14	simki.unpkediri.ac.id Internet Source	1%
15	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%
16	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	<1%
17	docobook.com Internet Source	<1%
18	www.scribd.com Internet Source	<1%
19	ml.scribd.com Internet Source	<1%
20	ejournal.umm.ac.id Internet Source	<1%

Submitted to Universitas Putera Batam

21	Student Paper	<1%
22	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1%
23	pt.scribd.com Internet Source	<1%
24	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1%
25	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1%
26	id.123dok.com Internet Source	<1%
27	jurnal.polibatam.ac.id Internet Source	<1%
28	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
29	adoc.tips Internet Source	<1%
30	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1%
31	Aristyan Jeffri Nugroho, Martianus Budiantara. "Factors Affecting Financial Performance Of District/City Local Government Of Yogyakarta", 085228282256, 2017	<1%

32

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1%

33

docplayer.info

Internet Source

<1%

34

manajemen.fe.um.ac.id

Internet Source

<1%

35

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1%

36

mafiadoc.com

Internet Source

<1%

37

Mega Andani, Sarwani Sarwani, Novita Weningtyas Respati. "PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA", Jurnal Akuntansi, 2019

Publication

<1%

38

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1%

39

Sineba Arli Silvia. "Pengaruh Kualitas Aset Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2017

Publication

<1%

40	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1%
41	www.jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	<1%
42	ojs.unikom.ac.id Internet Source	<1%
43	Submitted to General Sir John Kotelawala Defence University Student Paper	<1%
44	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
45	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off